

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dijelaskan bahwa bencana adalah kejadian yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, atau sosial, yang memiliki potensi untuk membahayakan dan mengganggu kehidupan manusia yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, lingkungan yang mengalami kerusakan, dan efek psikologis pada manusia sebagai akibat dari kejadian tersebut. Bencana ini dapat terjadi akibat adanya ancaman, dampak, serta kerentanan bagi kehidupan manusia (Isnaini. R., 2019). BNPB berpendapat yakni bencana alam didefinisikan sebagai jenis bencana yang timbul karena kekuatan alam dan mengakibatkan serangkaian peristiwa yang membahayakan kehidupan manusia. Bencana alam memiliki beberapa macam yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Selanjutnya, bencana non alam yakni suatu bencana yang terjadi karena faktor non alam yang dapat menimbulkan beberapa rangkaian peristiwa yaitu seperti gagalnya teknologi pada masa kini, gagalnya pada era modernisasi, epidemi, serta penyebaran wabah penyakit. Kemudian, bencana sosial merupakan jenis bencana yang timbul akibat tindakan manusia yang dapat terjadinya serangkaian peristiwa seperti konflik antara kelompok atau komunitas masyarakat, serta tindakan teror.

Di Indonesia sering terjadi beberapa bencana alam yaitu seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, cuaca ekstrem,

gunung meletus, kebakaran hutan, dan kekeringan. Berikut ini data dari bencana alam yang terjadi di Indonesia tahun 2023:

Tabel 1. 1 Kejadian Bencana Alam yang Ada di Indonesia Tahun 2023

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH
1	Tanah Longsor	491
2	Banjir	989
3	Gempa Bumi	26
4	Tsunami	0
5	Gelombang Pasang Laut	24
6	Cuaca Ekstrem	981
7	Gunung Meletus	2
8	Kebakaran Hutan	818
9	Kekeringan	158
JUMLAH		3.489

Sumber : Data Kejadian Bencana Alam yang Ada di Indonesia, Databoks (2023)

Dalam Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa urutan bencana yang sering terjadi sampai dengan bencana yang jarang terjadi pada tahun 2023 yaitu, sebagai berikut:

1) Banjir, 2) Cuaca ekstrem, 3) Kebakaran hutan, 4) Tanah longsor, 5) Kekeringan, 6) Gempa bumi, 7) Gelombang pasang laut, 8) Gunung Meletus, dan 9) Tsunami.

Dari data tersebut, yang memiliki angka tertinggi pada kejadian bencana alam di Indonesia pada tahun 2023 adalah banjir. Pada saat itu, jumlah kejadian yang terdampak bencana banjir yaitu sekitar 989 kali dari bencana yang terjadi di Indonesia. Namun, berdasarkan data tersebut bencana alam yang memiliki angka terkecil pada kejadian bencana alam di Indonesia tahun 2023 yaitu bencana Tsunami karena tidak memiliki angka kejadian atau tidak terjadi di Indonesia pada tahun 2023.

Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh letak astronomis Indonesia yang terletak antara 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT menjadikannya memiliki iklim tropis. Oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan Indonesia memiliki suhu yang tinggi sekitar 700 mm - 7000 mm per tahun (Hikmah, 2017). Penyebab banjir di Indonesia meliputi faktor-faktor seperti curah hujan tinggi, kekurangan penyimpanan air di Daerah Aliran Sungai (DAS), kesalahan dalam pembangunan infrastruktur, pendangkalan sungai, dan masalah perencanaan tata ruang yang tidak tepat (Rahmaniah, 2021). Dibeberapa wilayah yang ada di Indonesia memiliki banyak bangunan-bangunan sehingga dapat menimbulkan sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan di sekitar sungai. Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah yang perlu menangani masalah banjir ini, melainkan juga masyarakat perlu sadar dalam bergerak mencegah maupun menanggulangi banjir seperti menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar masing-masing. Selain itu, pemerintah atau instansi yang terlibat perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang kurang memahami mengenai sistem drainase yang sangat berpengaruh bagi menjaga lingkungan sekitar, karena masih ada masyarakat awam sehingga hal ini akan sulit diberikan pemahaman, saran, dan pengertian.

Berikut ini data beberapa Wilayah Indonesia yang mengalami banjir pada tahun 2023 yaitu:

Gambar 1. 1 Wilayah Indonesia yang Mengalami Banjir Tahun 2023



Sumber : Jumlah Bencana Banjir Berdasarkan Provinsi, BNPB (2023)

Dalam Gambar 1.1 dijelaskan bahwa dari 7 Provinsi dapat diurutkan banjir yang sering terjadi sampai dengan banjir yang jarang terjadi tahun 2023 di Indonesia yaitu: 1) Jawa Barat; 2) Jawa Tengah; 3) Kalimantan Selatan; 4) Sulawesi Selatan; 5) Kalimantan Timur; 6) Aceh; dan 7) Kalimantan Tengah. Sementara itu, diantara 7 Provinsi di Indonesia yang paling banyak mengalami banjir yaitu di Provinsi Jawa Barat. Kemudian, Provinsi di Indonesia yang mengalami banjir paling sedikit terjadi adalah di Kalimantan Tengah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih banyak provinsi-provinsi di Indonesia yang mengalami banjir pada tahun 2023. Namun, dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Tengah berada ditingkat kedua wilayah yang terdampak banjir di tahun 2023.

Berikut ini Data Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang Mengalami Banjir Tahun 2023:

Tabel 1. 2 Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang Mengalami Banjir Tahun 2023

NO	KOTA/KABUPATEN	JUMLAH
1.	Grobogan	7
2.	Pati	2
3.	Jepara	1
4.	Kota Salatiga	1
5.	Kota Semarang	11
JUMLAH		22

Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB (2023)

Dalam Tabel 1.2 tersebut dijelaskan bahwa Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki angka jumlah kejadian bencana banjir terbanyak di Tahun 2023 yaitu Kota Semarang dengan jumlah kejadian 11 kali. Kemudian, disusul Grobogan, Pati, Jepara, dan Kota Salatiga. Kota Semarang menduduki di rangking pertama diantara Kota/Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Faktor penyebab terjadinya banjir di Kota Semarang yaitu adanya permukaan tanah yang mengalami penurunan sekitar 7,7cm per 4 Tahun (Kasfari, dkk., 2018). Kota Semarang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah serta merupakan Ibukota dari Provinsi Jawa Tengah sehingga terdapat gedung-gedung tinggi di wilayahnya, lalu apabila terjadi bencana banjir dapat menimbulkan dampak seperti tanah menjadi rusak, jalanan retak, dan lain-lain. Menurut WALHI Jawa Tengah (2023) menyatakan bahwa dengan adanya kesalahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Semarang dapat menimbulkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga hal

ini mengakibatkan terjadinya banjir. Di Kota Semarang itu sendiri mengalami perubahan secara signifikan pada penyediaan lahan dalam jangka waktu 30 tahun terakhir.

Berikut ini rekapitulasi kejadian bencana banjir di Kota Semarang tahun 2015-2023:

Tabel 1. 3 Rekapitulasi Kejadian Bencana Banjir di Kota Semarang Tahun 2015-2023

NO	DATA KEJADIAN BANJIR	
	Tahun	Jumlah Kejadian
1.	2015	761
2.	2016	30
3.	2017	28
4.	2018	36
5.	2019	18
6.	2020	23
7.	2021	88
8.	2022	63
9.	2023	18
JUMLAH		1.065

Sumber : Data Bencana, BPBD Kota Semarang (2023)

Berdasarkan Tabel 1.3 menjelaskan bahwa jumlah kejadian banjir terbanyak di Kota Semarang pada periode 2015-2023 yaitu tahun 2015 dengan memiliki jumlah kejadian 761 kali. Kemudian, jumlah kejadian banjir tersedikit di Kota Semarang pada periode tahun 2015-2023 yaitu tahun 2023 dengan jumlah kejadian 18 kali. Dalam konteks ini, isu banjir di Kota Semarang berhubungan dengan kondisi geologi dan hidrologi antara Kota Semarang dan wilayah hinterlandnya, yang dapat menghasilkan zona krisis geologi dan hidrologi, yang dapat menyebabkan masalah ekologis seperti banjir kiriman, sedimentasi sungai,

tanah longsor, dan genangan di Kota Semarang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang perlu menanggulangi bencana banjir ini dengan cepat dan baik.

Ramadhan dan Matondang (2016) dalam Ferdiansyah, dkk. (2020) menjelaskan bahwa penanggulangan bencana mencakup serangkaian kegiatan yang dijalankan pada sebelum, saat, dan setelah bencana itu terjadi, serta hal tersebut menjadi bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang diatur oleh pemerintah. Kemudian, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menerapkan beberapa kemampuan yaitu membuat perencanaan kegiatan pada saat terjadi bencana, memberikan bantuan koordinasi, serta merumuskan kebijakan rekonstruksi. Selain itu, Kusumasari (2014) dalam Ferdiansyah, dkk. (2020) menyatakan bahwa pemerintah pusat perlu melaksanakan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah agar bisa bekerja sama dalam menanggulangi bencana banjir dengan mengembangkan program manajemen bencana. Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2007 mengenai Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk penanggulangan bencana. Ini mencakup penerapan langkah-langkah pencegahan, penanganan, serta penanggulangan bencana yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2010 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang menjelaskan bahwa dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan, yaitu untuk:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penanggulangan bencana melalui sistem kebijakan umum pada pembangunan daerah;
- b. Mengidentifikasi kondisi darurat bencana;
- c. Melakukan kolaborasi dalam menanggulangi bencana dengan Pemerintah Kota/Kabupaten yang berdekatan dengan daerah tersebut;
- d. Melaksanakan pengawasan serta evaluasi dalam menjalankan penanggulangan bencana;
- e. Menegakkan hukum yang terkait dengan Perpu; dan
- f. Membangun kerjasama dan kemitraaan dengan beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penanggulangan bencana yang mengacu pada Perpu yang berlaku.

Instansi Pemerintah yang memiliki wewenang dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Fungsi dari BPBD Kota Semarang ini yaitu sebagai pemimpin atau aktor utama di bidang penanggulangan bencana yang akan dibantu oleh instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Penanggulangan banjir ini tidak dapat dijalankan oleh satu instansi saja sehingga diperlukannya kerja sama antar instansi agar mampu mewujudkan sinergitas bersama-sama. Dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang diperlukannya *Collaborative Governance* agar mampu mengatasi bencana banjir di Kota Semarang dengan baik dan efektif. Efektivitas suatu kolaborasi dapat dilihat dari adanya rapat koordinasi yang efisien. Rapat koordinasi dilakukan oleh instansi-

instansi yang terlibat dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang dengan membahas tugas pokok dan fungsinya serta membuat keputusan.

Collaborative Governance merupakan suatu kerjasama antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk memecahkan dan mengatasi masalah yang terjadi. Ansell & Gash (2008) menyatakan bahwa *Collaborative Governance* adalah koordinasi antara organisasi pemerintah dengan organisasi non pemerintah dalam penyusunan keputusan bersama secara formal, hal ini menekankan pada pencapaian kesepakatan dan diskusi, serta tujuan dari kolaborasi ini untuk merancang ataupun melaksanakan kegiatan publik. Model *Collaborative Governance* meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Dalam model *Collaborative Governance* yang menjadi kunci utama yakni proses kolaborasi, lalu diikuti oleh kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan yang menjadi hal yang penting bagi proses kolaborasi itu sendiri. Selanjutnya, proses kolaborasi memiliki 5 indikator yakni *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*.

Sunarharum (2016) dalam Sihaloho (2022) berpendapat bahwa *collaborative governance* mampu menghadapi tantangan yang ada di masyarakat saat terjadinya banjir, misalnya : 1) Adanya perbedaan tanggapan antara pemerintah dengan masyarakat mengenai penanggulangan banjir, 2) Terbatasnya literasi teknis serta ilmu pengetahuan pada masyarakat yang terkena dampak banjir, serta 3) Terbatasnya keahlian dalam membuat kebijakan mengenai mitigasi banjir. Kemudian, Ulum (2013) dalam Sihaloho (2022) menyatakan bahwa

menanggulangi banjir memerlukan keterlibatan pihak-pihak yang bergerak dibidang tersebut dan membutuhkan partisipasi masyarakat dengan bersama-sama menghadapi masalah banjir. Maka dari itu, model strategi tersebut mampu mengurangi risiko banjir yang akan terjadi berikutnya. Selain itu, Hapsari & Zenurianto (2016) dalam Sihaloho (2022) mengatakan bahwa *collaborative governance* dijadikan sebagai solusi berkelanjutan dan komprehensif yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat maupun pemerintah.

Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris BPBD Kota Semarang (2023) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan atau aktor yang berperan dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang terdiri dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Lembaga pemerintah terdiri dari BPBD Kota Semarang, DPU Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, dan DLH Kota Semarang. Kemudian, lembaga non-pemerintah seperti BBWS Pemali Juana, Kantor SAR Semarang, dan PMI Kota Semarang. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berpartisipasi dalam penanggulangan bencana banjir memiliki masing-masing tugas dan fungsi. Bencana banjir di Kota Semarang setiap tahunnya masih terjadi sehingga diperlukan kelembagaan yang bersifat permanen dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang. Kelembagaan ini berdasarkan Peraturan Walikota Semarang yang telah ditetapkan berisi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Semarang.

Para *stakeholder* melakukan pertemuan dan rapat koordinasi untuk membangun komunikasi secara langsung atau tatap muka dengan membahas pembagian tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam menanggulangi

bencana banjir di Kota Semarang. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kolaborasi yakni belum adanya wadah koordinasi yang menjembatani untuk bergerak satu pintu sehingga hal ini dapat menghambat proses kolaborasi. Pada dasarnya, tujuan dilakukan koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu untuk mempercepat pelaksanaan dalam penanggulangan bencana banjir. Menurut Walikota Semarang (2023) juga menyatakan bahwa kolaborasi antar instansi perlu dilakukan untuk mempercepat proses penanganan sampai pasca banjir itu terjadi seperti memberikan bantuan logistik kepada masyarakat. Permasalahan lainnya yaitu beberapa instansi yang tidak merespon dengan cepat. Dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang seharusnya para aktor harus cepat dan sigap untuk membantu masyarakat yang terdampak. Pada kenyataannya, masalah banjir ini belum teratasi dengan baik, dimana setiap tahunnya masih terjadi banjir di wilayah Kota Semarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat permasalahan muncul.

Berdasarkan penjelasan mengenai informasi, data, serta fakta saat terjadinya bencana banjir diatas, dapat disimpulkan bahwa perlunya kolaborasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk melaksanakan penanggulangan bencana banjir mengingat Kota Semarang sering mengalami banjir. Hal ini dapat dilihat bahwa penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja, namun membutuhkan beberapa sektor agar mampu mengatasi masalah banjir dengan efektif dan efisien. Namun, pada penerapan *collaborative governance* ini terdapat masalah yang terjadi yaitu belum adanya

wadah koordinasi yang menjebatani untuk bergerak satu pintu dan masih ada beberapa instansi yang tidak merespon dengan cepat. Maka dari itu, perlunya memaksimalkan peran pemangku kepentingan atau aktor kolaborasi yang berkaitan dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menganalisis pemecahan dari permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Proses *Collaborative Governance* dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Semarang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan proses *Collaborative Governance* dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan proses *Collaborative Governance* dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kemajuan ilmu pemerintahan, terutama dalam studi tentang strategi peran pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapannya adalah memberikan manfaat serta memperluas pemahaman ilmiah dan pengetahuan penelitian, dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam memahami fenomena maupun permasalahan terkait peran dari masing-masing *stakeholders* dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang.

b. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Harapannya adalah dapat memberikan masukan yang mampu dijadikan sebagai pertimbangan atau rekomendasi dalam pembuatan kebijakan tentang penanggulangan banjir di Kota Semarang.

c. Bagi Masyarakat

Harapannya adalah memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai permasalahan yang terjadi saat banjir di Kota Semarang dan cara penanggulangan yang tepat saat banjir terjadi.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Sihaloho, N.T.P., 2022	Mengidentifikasi <i>collaborative governance</i> dalam Penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan.	Teori yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan teori <i>collaborative governance</i> yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Menurut Ansell & Gash (2008) untuk memperoleh hasil yang terbaik diperlukan penerapan enam kriteria dasar pada <i>collaborative governance</i> , yakni sebagai berikut 1) Forum perlu dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, 2) Lembaga non pemerintah juga berpartisipasi dalam	Tipe Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui <i>literature review</i> secara <i>online</i> .	Aspek penanganan banjir di Medan, yang mencakup <i>governance</i> dan akuntabilitas distributif, harus diprioritaskan, diikuti oleh aspek-aspek lain seperti akses ke wewenang, pertukaran informasi, struktur jaringan, dan kepemimpinan. Jika pengambilan kebijakan melibatkan tahap antisipasi, maka hal yang perlu ditekankan yakni peran akademisi maupun pengembang perangkat lunak dalam pelaksanaan <i>collaborative governance</i> , sebab hasil tersebut sangat

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
			kolaborasi, 3) Dalam pengambilan keputusan peserta harus aktif, 4) Forum telah diatur dengan formal, 5) Dibuatnya forum untuk pengambilan keputusan berdasar konsensus, dan 6) kebijakan ataupun manajemen publik menjadi fokus pada kerjasama ini.		krusial bagi tahap mitigasi bencana dan peningkatan ketahanan.
2.	Riska, A., dkk., 2023	Menganalisis kolaborasi antar pemerintah dan hambatan kolaborasi antar pemerintah dalam menanggulangi banjir di Kota Banda Aceh.	Teori yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan teori <i>collaborative governance</i> yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Dalam teori ini Ansell dan Gash (2008:557) menyatakan bahwa proses <i>collaborative governance</i> memiliki 5 indikator, yakni: <i>face to</i>	Tipe Penelitian yang digunakan adalah yakni deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui	1. <i>Face to face dialogue</i> Diselenggarakannya pertemuan untuk membahas mengenai tugas yang perlu dilaksanakan oleh lembaga yang berhubungan dengan penanggulangan banjir di Kota Banda Aceh. 2. <i>Trust building</i> Dalam pertemuan tersebut dapat menjalin komunikasi yang baik antar <i>stakeholders</i>

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
			<p><i>face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, dan intermediate outcomes.</i></p>	<p>wawancara, observasi dan dokumentasi.</p>	<p>sehingga dapat berdiskusi dengan baik.</p> <p>3. <i>Commitment to the process</i> Dalam melakukan kolaborasi penanggulangan banjir tidak ada kesepakatan yang mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan.</p> <p>4. <i>Shared understanding</i> Setiap <i>stakeholders</i> yang berkaitan dengan penanggulangan banjir memahami tujuannya. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh sebaiknya tidak hanya cepat dalam penanggulangan banjir, tetapi cepat dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi banjir.</p> <p>5. <i>Intermediate outcomes</i> Kolaborasi dalam penanggulangan banjir di Kota Banda Aceh telah menjalankan komunikasi antar</p>

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
					pemangku kepentingan dengan rutin.
3.	Mutiarawati, T. & Sudarmo, 2021	Mengidentifikasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) yang berperan dalam mengatasi banjir rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan dan mengidentifikasi faktor penghambatnya.	Teori yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan teori <i>collaborative governance</i> yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Pada teori ini memaparkan tentang indikator pada <i>collaborative governance</i> , yakni struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, kepercayaan di antara para peserta, <i>governance</i> , akses terhadap otoritas, akuntabilitas/tanggung jawab distributif, berbagi	Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Jaringan Dalam menanggulangi rob di Kelurahan Bandengan, jaringan tidak membentuk hierarki, melainkan cenderung tidak monopoli dan <i>flat</i>. 2. Komitmen Terhadap Tujuan Bersama Para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan rob memiliki komitmen yang tinggi dalam mencapai tujuan bersama. 3. Kepercayaan di Antara Para Peserta Pelaksanaan penanggulangan rob di Kelurahan Bandengan, para pemangku kepentingan mempunyai hubungan yang profesional dan sosial dengan baik karena adanya kesadaran

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
			informasi, dan akses terhadap sumber daya.		<p>dalam menjalankan tugasnya masing-masing.</p> <p>4. <i>Governance</i> Belum adanya kejelasan <i>stakeholders</i> yang berperan dalam penanggulangan rob. Dengan begitu, belum diketahuinya pemangku kepentingan yang terlibat dalam masalah ini, sehingga tidak dapat membuat kesepakatan kerja dengan spesifik.</p> <p>5. Akses Terhadap Otoritas <i>Stakeholders</i> telah memahami alur prosedur dengan jelas serta mengetahui tupoksinya masing-masing.</p> <p>6. Akuntabilitas/Tanggung Jawab Distributif Belum adanya laporan pertanggungjawaban pada penanggulangan banjir rob. Selain itu, masih adanya kelemahan yaitu tingginya</p>

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
					<p>tingkat ketergantungan masyarakat.</p> <p>7. Berbagi Informasi Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan banjir saling melengkapi dan menyebarkan informasi dan data satu dengan yang lainnya.</p> <p>8. Akses Terhadap Sumber Daya Pemangku kepentingan telah berupaya untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam perbaikan fasilitas dan infrastruktur yang rusak akibat terjadinya rob. Namun, masih terdapat kelemahan seperti kekurangan sumber daya keuangan, jumlah SDM yang kurang dan, jumlah tenaga kerja yang terbatas.</p>

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
4.	Rusmawan, T., dkk., 2023	Menganalisis proses kolaborasi antar <i>stakeholders</i> dalam melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Purbalingga.	Teori yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan teori <i>collaborative governance</i> yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Ansell dan Gash (2008) menyatakan bahwa proses <i>collaborative governance</i> mempunyai 5 indikator, yakni: <i>face to face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, dan intermediate outcomes.</i>	Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.	<p>1. <i>Face to face dialogue</i> Diadakannya forum diskusi antar pemangku kepentingan dari lingkup pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kemudian, dilakukan kegiatan sosialisasi untuk menjelaskan pemetaan lokasi pedesaan yang memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana alam, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan berbagai pihak terlibat dalam penanggulangan bencana alam untuk memastikan akurasi informasi. Hal ini diharapkan dapat memudahkan pertukaran informasi dan menemukan solusi yang sesuai untuk mengatasi bencana alam di Kabupaten Purbalingga.</p> <p>2. <i>Trust building</i> <i>Stakeholders</i> yang ikut serta dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten</p>

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
					<p>Purbalingga sudah memiliki rasa kepercayaan yang sama dalam melakukan penyelamatan. Selain itu, perlunya melakukan koordinasi yang baik antar <i>stakeholders</i> dengan baik dari pihak swasta maupun masyarakat.</p> <p>3. <i>Commitment to the process</i> Dalam melakukan komitmen, pemerintah melibatkan pihak swasta dan masyarakat melalui MoU antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan aktor-aktor yang terlibat dalam meminimalisir risiko kerugian yang dialami masyarakat.</p> <p>4. <i>Shared understanding</i> Setiap <i>stakeholders</i> yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Purbalingga saling memahami peran dan</p>

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
					<p>tujuannya. Dengan begitu, hal tersebut mendukung keterlibatan sektor swasta maupun masyarakat dalam memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi bencana alam.</p> <p>5. <i>Intermediate outcomes</i> Semua pemangku kepentingan telah melakukan tupoksinya dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Purbalingga. Kemudian, seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam penanganan bencana ini sudah melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik anatar pemerintah, swasta, dan masyarakat.</p>

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
5.	Machruf, I.N., dkk., 2020	Mengidentifikasi pelaksanaan pelaksanaan <i>collaborative governance</i> dalam penanggulangan Pra Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan.	Teori yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan teori <i>collaborative governance</i> yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Dalam penelitian ini, Ansell dan Gash (2008) menyatakan bahwa proses <i>collaborative governance</i> memiliki 5 indikator, yakni: <i>face to face dialogue</i> , <i>trust building</i> , <i>commitment to the process</i> , <i>shared understanding</i> , dan <i>intermediate outcomes</i> .	Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Face to face dialogue</i> Diadakannya forum diskusi antar pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan seperti sosialisasi dan pelatihan dengan mengundang aktor-aktor yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. 2. <i>Trust building</i> <i>Stakeholders</i> yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana tsunami di Lampung Selatan membangun kepercayaannya dengan menjaga konsistensi dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana tsunami serta para aktor telah membangun emosional dengan baik. 3. <i>Commitment to the process</i> Dalam memperkuat komitmen, <i>stakeholders</i> perlu

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
					<p>menjaga hubungan dengan baik satu sama lain sehingga dapat menanggulangi bencana tsunami dengan optimal.</p> <p>4. <i>Shared understanding</i> Setiap <i>stakeholders</i> yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam di Lampung Selatan perlu memahami peran dan kepentingannya masing-masing dalam memenuhi proses kolaborasi dengan berusaha memaksimalkan kinerja pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana tsunami di Lampung Selatan.</p> <p>5. <i>Intermediate outcomes</i> Kegiatan penanggulangan pra bencana alam tsunami di Lampung Selatan melibatkan beberapa <i>stakeholders</i> seperti BPBD Lampung Selatan, Dinsos Lampung Selatan, masyarakat, PMI, Tentara,</p>

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
					Polisi, Satpol pp, BMKG, RAPI, serta tenaga kesehatan.
6.	Avoyan, E. & Meijerink, S., 2021	Menganalisis kondisi eksternal dalam membentuk dinamika kolaborasi antar sektor pada masa lalu dan sekarang untuk manajemen risiko banjir di Belanda.	Teori yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan teori <i>collaborative governance</i> yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008) yakni teori <i>collaborative governance</i> . Ansell dan Gash (2008) menyatakan bahwa model <i>collaborative governance</i> meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi.	Tipe Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui tinjauan literatur dan wawancara.	Kolaborasi antar sektor merupakan suatu sistem multilevel yang kompleks dengan perubahan dari waktu ke waktu di sepanjang lintasan yang berbeda. Dalam kolaborasi ini, kondisi eksternal mencakup kebijakan dan kerangka hukum, politik dan hubungan kekuasaan, kondisi sosial ekonomi dan sejarah konflik. Penelitian ini menjelaskan bahwa intensitas kolaborasi antar sektor dilaksanakan setidaknya sampai batas tertentu yang

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
					sesuai dengan kondisi sistemik di luar dinamika dan proses kolaboratif yang sebenarnya.
7.	Abdeen, F.N., dkk., 2021	Mengidentifikasi tantangan yang terjadi berkaitan dengan kolaborasi multi-lembaga dalam menanggulangi bencana dan strategi yang harus diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut.	Penelitian ini menggunakan teori Kolaborasi multi-lembaga yang dikemukakan oleh McEntire (2010). Dalam teori ini menyatakan bahwa hubungan kolaborasi didasari dengan pemahaman mengenai sumber daya dan peran yang dilaksanakan oleh lembaga yang terkait.	Tipe Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi.	Kolaborasi multi-lembaga memiliki 7 tantangan yakni komunikasi, lingkungan, sosial, politik, tantangan antar-organisasi, intra-organisasi, dan infrastruktur. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya <i>platform</i> yang berteknologi canggih dan tidak adanya acuan yang jelas dalam berbagi data ke lembaga-lembaga agar dapat membangun asumsi tentang kebencanaan.

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
8.	Ishiwatari, M., 2019	Menganalisis kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam mengatasi risiko banjir di Jepang.	Penelitian ini memakai teori <i>governance</i> yang dipaparkan oleh Francesch-Huidobro (2005). Dalam teori ini menyatakan bahwa pelajaran dari program-program di Rotterdam dan Hong Kong bahwa FRM adaptif membutuhkan pendekatan konsensual dan terintegrasi dengan menghubungkan dan melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda.	Tipe Penelitian yang digunakan pada adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi.	Penelitian ini tidak ditemukan model yang cocok untuk pelaksanaan manajemen risiko bencana banjir. Kunci utama dalam memperkuat mekanisme kolaborasi yaitu membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan dan menggunakan pengetahuan lokal.

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
9.	Russell, C., dkk., 2021	Mengidentifikasi tata kelola kolaboratif (CG) - sistem di mana aktor otonom bekerja bersama di sekitar tujuan bersama menggunakan sumber daya yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan bersama.	Penelitian ini memakai teori <i>collaborative governance</i> yang dipaparkan oleh Emerson & Nabatch (2015). Dalam teori ini menjelaskan bahwa terdapat empat karakteristik yang membedakannya dari bentuk tindakan kolaboratif lainnya: 1) harus berkaitan dengan layanan atau kebijakan publik; 2) melibatkan berbagai aktor otonom yang memiliki kepentingan berbeda; 3) mengembangkan aturan dan kebiasaan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kolaborasi; dan 4) itu dirancang untuk pertukaran berulang antara aktor, dengan umur panjang dalam pikiran.	Tipe Penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.	Penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi lokal dalam PRB dengan meminggirkan politik akar rumput untuk menekankan tujuan yang dipimpin negara dari atas ke bawah. Pada gilirannya, hal ini membuat kami mempertanyakan kelangsungan rezim tata kelola yang muncul sebagai proyek kolaboratif yang benar-benar menanamkan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa jika narasi skalar negara ini terus membentuk kebijakan nasional, mereka akan menghambat potensi tindakan kolaboratif transformatif untuk PRB di Nepal.

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
10.	Robas, R.J.& Velasco, M.A., 2020	Menganalisis tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan DAS Marikina.	Penelitian ini menggunakan teori kolaborasi oleh Mancur Olson. Dalam penelitian ini, Mancur Olson menjelaskan bahwa peran dan kepentingan individu dalam sebuah kelompok diperlukan untuk membangun kepentingan bersama antar sektor terkait.	Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka.	Dalam konteks mitigasi bencana, pengelolaan sungai Marikina dan daerah aliran sungai membutuhkan kolaborasi antar <i>stakeholders</i> untuk melakukan mengurangi risiko bencana dan manajemen risiko. Namun, pengelolaan DAS dan Sungai Marikina dalam mengurangi risiko bencana sangat menantang karena berkaitan dengan situasi dan kendala dalam aspek politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum yang dikaitkan dengan batas

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
					geografis dan spasial, otonomi daerah.

Sumber : Hasil Analisis Oleh Peneliti (2023)

Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini yakni pada penelitian pertama membahas mengenai identifikasi aspek-aspek penanggulangan banjir di Kota Medan yang harus diprioritaskan dengan aspek *governance* dan *distributive accountability*, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir seperti budaya dan institusi. Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini yakni pada penelitian kedua membahas mengenai *collaborative governance*, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses kolaborasi. Perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian ini yakni pada penelitian ketiga membahas mengenai indikator *collaborative governance* yang dipaparkan oleh Ansell & Gash (2008) yakni struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, kepercayaan di antara para peserta, dan lain-lain, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai indikator pada proses kolaborasi. Perbedaan penelitian keempat, kelima, dan kesepuluh dengan penelitian ini yakni memiliki permasalahan dan lokasi penelitian yang berbeda. Perbedaan penelitian keenam dengan penelitian ini yakni pada penelitian keenam membahas model *collaborative governance*, sedangkan penelitian ini lebih berfokus dengan proses kolaborasi. Perbedaan penelitian ketujuh dengan penelitian ini yakni pada penelitian ketujuh membahas mengenai tantangan yang terjadi berkaitan dengan kolaborasi multi-lembaga, sedangkan penelitian ini membahas proses kolaborasi. Perbedaan penelitian kedelapan dengan penelitian ini yakni pada penelitian kedelapan membahas mengenai kunci utama dalam memperkuat mekanisme kolaborasi, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai penerapan proses kolaborasi. Perbedaan penelitian

kesembilan dengan penelitian ini yakni pada penelitian kesembilan membahas skala perubahan kelembagaan dalam pengurangan risiko bencana di Nepal, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai proses kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut Panjaitan, D. & Pardede, P. (2021) menyatakan bahwa administrasi adalah serangkaian tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, administrasi merupakan suatu arahan, pemerintahan, aktivitas pengarah, kegiatan penerapan kebijakan, menciptakan prinsip-prinsip mengenai penerapan kebijakan publik, melaksanakan analisis kebijakan, adil dalam membuat keputusan, mempertimbangkan beberapa kebijakan, serta upaya individu maupun kelompok dalam menciptakan barang dan jasa publik, hal ini juga merupakan domain yang relevan dalam ranah akademik dan teoritis. Kemudian, Administrasi Negara/Publik (*Public Administration*) dapat diartikan sebagai suatu ilmu sosial yang mendalami tiga komponen penting dalam kehidupan suatu negara seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selain itu, administrasi publik mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan masyarakat, seperti kebijakan pemerintah, manajemen pembangunan, tujuan negara, dan standar etika yang mengatur tata kelola pemerintahan (Rodiyah, dkk., 2021). Selain itu, pengertian administrasi publik secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mendalami beberapa hal mengenai cara mengelola suatu organisasi publik. Meskipun

administrasi publik membahas topik-topik terkait organisasi publik, perbedaannya jelas dengan ilmu manajemen. Sementara manajemen fokus pada pengelolaan organisasi swasta, administrasi publik mempelajari pengelolaan entitas pemerintah atau publik, termasuk departemen dan dinas, dari tingkat kecamatan hingga tingkat pusat. Selanjutnya, kajian ini juga membahas tentang birokrasi; menyusun, implementasi, serta evaluasi kebijakan publik; pemerintahan pusat dan daerah; administrasi pembangunan; dan *good governance* (Panjaitan dan Pardede, 2021).

Menurut Rodiyah, dkk. (2021) menyatakan bahwa administrasi publik mendalami berbagai ilmu pengetahuan tentang lembaga yang terkecil seperti keluarga sampai ke lembaga terbesar seperti PBB yang disusun, digerakkan serta dijalankan. Selain itu, administrasi publik juga dikatakan sebagai bagian dari ilmu politik sehingga dapat dijadikan sebagai penentu kebijakan dalam suatu negara. Oleh sebab itu, administrasi publik ini mempunyai dua syarat apabila sedang dipelajari oleh masyarakat. Dalam hal ini, syarat yang pertama adalah untuk mengetahui mengenai administrasi umum. Kemudian, yang kedua adalah untuk mengakui tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam administrasi publik karena timbulnya pada politik tertentu.

Administrasi publik dijadikan sebagai tali penghubung antara pemerintah dengan masyarakat (Malawat, 2022). Disamping itu, administrasi publik berperan dalam memperjelas interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan tanggung jawab kebijakan

publik dan mencapai efektivitas serta efisiensi dalam implementasinya. Selanjutnya, dalam pengembangan administrasi publik, penting untuk memperhitungkan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesuksesan atau keberlangsungan suatu bidang yang dikelola, sehingga faktor lingkungan ini dapat berdampak pada kemajuan administrasi publik, terutama dari lingkungan eksternal.

Salah satu konsep yang terbaik untuk menjabarkan mengenai administrasi publik adalah konsep administrasi publik sebagai sebuah proses. Menurut Rodiyah, dkk. (2021) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan proses administratif yang melibatkan langkah-langkah yang harus diambil oleh badan pelaksana dan penerima kewenangan, hingga tahap akhir pelaksanaan. Dengan demikian, administrasi publik dilihat sebagai serangkaian kegiatan mulai dari penetapan tujuan hingga penunjukan pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks ini, administrasi publik memiliki beragam makna yang terkait dengan berbagai perspektif yang digunakan.

Berdasarkan berbagai pengertian dari administrasi publik diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik menjelaskan berbagai serangkaian kerja sama yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok orang dalam menerapkan tugas lembaga publik agar memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik dengan efektif. Dengan demikian, hal tersebut dapat dijadikan sebagai tugas utama dari administrasi publik dalam membuat perencanaan dan perumusan kebijakan politik serta dalam penerapannya.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Rodiyah (2021) menjelaskan bahwa paradigma merupakan suatu alur pandangan atau pemikiran yang berdasarkan pada beberapa ilmu mengenai pokok permasalahan yang seharusnya dipelajari lebih dalam oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Kemudian, Inu Kencana dalam Rodiyah (2021) menyatakan bahwa paradigma juga dapat dikatakan sebagai pola pemikiran seseorang yang berkaitan dengan sifat ilmu pengetahuan yang tidak relatif. Dalam hal ini, semua perubahan terjadi sesuai jangka waktu tertentu dan dapat diterima dengan universal. Administrasi publik dapat dianggap sebagai cabang ilmu sosial yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Perkembangan ini tercermin dalam penggunaan teori, paradigma, model pemikiran, analisis, arah pemikiran, dan metode yang digunakan dalam studi administrasi publik.

Thoman S. Kuhn dalam Rodiyah (2021) menjelaskan bahwa paradigma merupakan perspektif yang meliputi nilai-nilai, metode, prinsip-prinsip dasar, atau pendekatan dalam menyelesaikan fenomena tertentu yang diakui oleh komunitas ilmiah selama periode tertentu. Selain itu, Nicholas Henry dalam Rodiyah (2021) berpendapat bahwa paradigma administrasi publik sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga mampu membuat mereka mengetahui serta memahami tentang bidang-bidang yang ada di dalam administrasi publik. Setelah mengkaji dan mengembangkan administrasi publik sebagai bidang akademik dengan enam paradigma yang saling melengkapi, sehingga setiap paradigma mempunyai karakteristik

tertentu yang mengacu pada lokus dan fokusnya. Berikut ini perkembangan paradigma administrasi publik:

1. Paradigma I (Dikotomi Politik/Administrasi 1900-1926)

Pandangan utama paradigma dikotomi politik dan administrasi yakni tanggapan tentang pemisahan fungsi politik dan administrasi pemerintahan, yang dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Ikeanyibe, et al., 2017). Dalam hal ini, pada era model administrasi yang umum, diakui bahwa administrasi atau manajemen perlu didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang berlaku di sektor publik dan swasta. Kemudian, menurut Basheka (2012) dalam Ikeanyibe, et al. (2017) menjelaskan bahwa Woodrow Wilson (1897) yang merintis paradigma tersebut menetapkan empat syarat administrasi publik yang efektif, yakni :

- a. Memisahkan urusan politik dari administratif,
- b. Membandingkan struktur organisasi politik dan swasta,
- c. Meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis dalam operasi sehari-hari, dan
- d. Meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan pelatihan pada PNS, serta mendukung evaluasi kinerja berbasis hasil.

Dalam paradigma ini perlu diapresiasi karena diawali dengan bidang studi yang memberikan dasar yang kuat untuk teori dan pemahaman administrasi publik. Kemudian, yang menjadi fokus utama adalah mengarahkan bidangnya ke arah ilmiah dengan usaha memisahkan antara

fakta dan nilai. Selain itu, Menurut Henry (1975, hlm. 379) dalam Ikeanyibe, et al. (2017) menyatakan bahwa hasil dari paradigma I yaitu memperkuat suatu gagasan mengenai politik dikotomi administrasi sehingga dikaitkan dengan dikotomi nilai/fakta yang sesuai. Dengan demikian, aspek-aspek yang diselidiki oleh administrasi publik di ranah eksekutif disajikan dengan otoritas dan validitas yang bersumber dari aspek "faktual" dan "ilmiah," sedangkan penelitian terkait pembuatan kebijakan publik dan topik terkaitnya akan menjadi fokus ilmuwan politik.

Dalam hal ini, inti pembahasan dari paradigma I adalah pengenalan pemisahan fungsi antara fungsi politik dengan fungsi administrasi. Fungsi politik bertanggung jawab atas perumusan kebijakan dan perwakilan kewenangan Negara melalui badan legislatif dan yudikatif. Sementara itu, fungsi administratif bertugas melaksanakan kebijakan dengan badan eksekutif sebagai pelaksananya. Paradigma I juga menyoroti peran birokrasi pemerintahan sebagai pusat kegiatan, meskipun fokusnya belum sepenuhnya terdefinisi dengan jelas.

2. Paradigma II (Prinsip-prinsip Administrasi Negara 1927-1937)

Paradigma II merupakan langkah maju dalam administrasi, menuju arah manajemen dengan meningkatkan status administrasi publik hingga menjadi disiplin ilmu. Keyakinan terhadap prinsip-prinsip ilmiah tertentu dalam administrasi publik dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kinerja yang efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip ini dianggap dapat diadopsi secara universal tanpa

memperhatikan sektor, budaya, fungsi, lingkungan, misi, atau struktur kelembagaan. Kemudian, menurut Gulick dan Urwick (1937) dalam Ikeanyibe, et al. (2017) menyatakan bahwa ada tujuh prinsip administrasi yakni *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting* serta *Budgeting* (POSDCORB) yang merupakan puncak dari tahap ini. Lokus administrasi publik pada paradigma ini kurang dijelaskan secara spesifik, karena prinsip-prinsipnya dianggap berlaku di berbagai instansi atau organisasi pemerintah. Paradigma ini lebih menekankan pada lokusnya sendiri. (Keban, 2014).

Fokus pada prinsip-prinsip administrasi negara menjadi inti dari paradigma II, terutama dalam konteks administrasi publik yang dikenal sebagai POSDCORB. Kemudian, fokusnya universal (terdapat di mana-mana) dan terjadi baik dalam organisasi publik maupun swasta.

3. Paradigma III (Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik 1950-1970)

Menurut Henry (1975) dalam Ikeanyibe, et al. (2017) Paradigma III dapat dikatakan sebagai paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970), di mana terjadi perlawanan antara para ilmuwan politik untuk mengklaim kembali administrasi publik. Sementara itu, dalam periode yang sama, terjadi upaya yang semakin meningkat oleh para ahli teori manajemen untuk mendorong pengakuan disiplin mereka. Selain itu, Basheka (2012) dalam Ikeanyibe, et al. (2017) menyatakan bahwa pada kurun waktu ini dijadikan sebagai era mengecilkkan dikotomi serta merujuk

pada prinsip-prinsip. Sebagai hasilnya, dikotomi politik-administrasi menjadi kontroversial karena administrasi tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari politik dalam konteks pemerintahan sebenarnya. Akan tetapi, berdasarkan pandangan Basheka mengenai politik menjelaskan bahwa politik partisan dan korup diperluas dalam arti ilmiah pada tahun 1930-an untuk membuat kebijakan publik. Selanjutnya pada titik ini, dapat dikatakan sebagai dikotomi praktis tidak dapat dipertahankan. Menurut Gaus (1950) dalam Ikeanyibe, et al. (2017) menjelaskan bahwa teori administrasi publik pada zaman ini diartikan juga sebagai teori politik juga. Selain itu, menurut Herbert dikatakan juga bahwa "prinsip administrasi" itu tidak ada. Perilaku Administratif Simon: Studi Proses Pengambilan Keputusan dalam Administrasi Organisasi (1947) adalah sumber tantangan yang paling penting pada periode ini. Dia bekerja berisi kritik pencarian Administrasi Publik yang lebih tua, khususnya penggunaan "prinsip-prinsip". Dengan demikian, produk akhirnya adalah penobatan negara kesejahteraan.

Respons terhadap munculnya pandangan baru yang memandang administrasi publik sebagai cabang ilmu politik, dengan birokrasi pemerintahan sebagai pusat perhatian menjadi inti dari paradigma III, namun fokusnya masih ambigu karena kelemahan dalam prinsip-prinsip administrasi publik. Paradigma ini mencakup dua perkembangan penting yakni 1) meningkatnya pemanfaatan studi kasus sebagai alat pengetahuan,

2) perkembangan riset perbandingan dan pembangunan administrasi menjadi bagian penting dari disiplin ilmu administrasi.

4. Paradigma IV (Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi 1956 -1970)

Menurut Henry (1975) dalam Ikeanyibe, et al. (2017) menyatakan bahwa paradigma IV mencakup pada administrasi publik sebagai manajemen (1956-1970). Dalam hal ini, hampir bertepatan dengan tahap ke 3 yang menjelaskan bahwa beberapa sarjana mengintegrasikan gagasan tentang manajemen administrasi publik sehingga itu bukan merupakan kemenangan untuk ilmu politik. Oleh karena itu, pada tahap 3 dan 4, persaingan antara dua disiplin ilmu untuk mendefinisikan administrasi publik hampir tidak meninggalkan ruang bagi pengembangan lokus dan fokus untuk ilmu pengetahuan serta bidang studi yang baru diakui yang diungkapkan oleh para sarjana perintis. Maka dari itu, administrasi publik perlu dihubungkan dengan perspektif dunia lain yang dapat mengintegrasikan kepentingan lokus maupun fokusnya.

5. Paradigma V (Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara 1970 sampai sekarang)

Paradigma V bertujuan untuk membangun kembali disiplin administrasi publik sebagai entitas yang mandiri. Setelah itu, fokus utama yang sebelumnya terletak pada hierarki dan birokrasi dialihkan ke pasar dan organisasi swasta. Hal ini mengakibatkan pergeseran dari model administrasi publik konvensional ke model NPM. Namun, ini menimbulkan

perlawanan terhadap paradigma-paradigma sebelumnya yang diakui oleh Henry (1975), menandakan perubahan paradigma yang signifikan menurut Peters (2003, hal. 9). Kemudian, menurut Peters (2003) dalam Ikeanyibe, et al. (2017) menyatakan bahwa terdiri dari lima asumsi model tradisional yang didaftar oleh Walsh dan Stewart (1992) seperti yang ditunjukkan di atas, adalah kumpulan ide yang layak digunakan serta menjelaskan cara pemerintah melakukan tugasnya di sektor publik pra-reformasi NPM. Dengan demikian, tidak hanya terjadi pergeseran paradigma yang kritis yang tidak diuraikan secara rinci oleh Henry (1975), tetapi tiga arus tersebut juga menunjukkan perbedaan antara paradigma Konvensional atau Tradisional, paradigma NPM, dan paradigma Tata Kelola. Dalam hal ini, NPM dijadikan sebagai pendekatan atau paradigma sebelumnya yang muncul untuk menghadapi permasalahan yang sama dalam sistem administrasi. Ini terjadi karena adanya penggabungan antara teori ekonomi dan teknik manajemen dari sektor swasta. Kemudian, dari anggapan lain dari administrasi publik tradisional yaitu seperti klaim birokrasi Weberian sebagai struktur yang paling tepat untuk administrasi yang efektif semuanya ditentang oleh paradigma ini.

Sementara itu, inti pembahasan dari paradigma V adalah mempunyai fokus maupun lokus yang jelas. Teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik menjadi fokus dari administrasi publik dalam paradigma ini. Kemudian, permasalahan dan kepentingan yang terjadi pada publik atau masyarakat menjadi lokusnya.

6. Paradigma VI (*Governance* 1990 sampai sekarang)

Pada paradigma VI ini membahas tentang tujuan pemerintah serta administrasi publiknya adalah *governance*. Ini bisa dianggap sebagai istilah yang sering dipakai sebagai pengganti kata "pemerintah" atau untuk merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Ikeanyibe, et al., 2017). Namun, konsep tersebut tidak baru tetapi telah memperoleh baru makna dan aplikasi dari akhir 1980-an dan 1990-an. Selanjutnya, gagasan ini bisa dijelaskan sebagai penerapan kekuasaan atau wewenang terhadap pemimpin politik untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakatnya, merupakan proses yang kompleks di mana berbagai sektor masyarakat memiliki kekuasaan dan menerapkan serta menyebarkan kebijakan publik yang secara langsung memengaruhi interaksi antara manusia dengan lembaga, serta perkembangan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014 dalam Ikeanyibe, et al., 2017). Sementara itu, paradigma *governance* yang menjadi fokus tulisan ini mempunyai kesamaan asal dan hubungan konseptual dengan NPM yang diyakini berhasil. Selain itu, menurut Peters (2003, hlm. 18) dalam Ikeanyibe, et al. (2017) menyatakan bahwa kedua paradigma tersebut memiliki kecocokan antara satu sama lain. Kemudian, keduanya berusaha memecah hierarki serta memiliki Sistem administrasi yang hierarkis yang telah diwarisi dari masa lampau.

Stoker (1998) dalam Ikeanyibe, et al. (2017) menyatakan bahwa budaya administrasi Anglo-Amerika menggunakan istilah pemerintah untuk merujuk pada lembaga formal negara dan monopoli mereka yang sah

kekuasaan koersif, sedangkan pemerintahan mencerminkan pola pergeseran gaya pemerintahan di mana batas-batas di dalam dan antara sektor publik dan lainnya menjadi tidak jelas. Seperti NPM, peran pemerintah masih bertolak belakang (Osborne & Gaebler, 1992). Sementara itu, menurut Ikeanyibe (2016), membutuhkan penggunaan sektor lain (laba dan nirlaba) untuk mendayung perahu yang sebenarnya (penyediaan pelayanan), sedangkan pemerintah mengarahkan serta mengatur dan mengoordinir. Secara signifikan, mekanisme operasi dalam orientasi tata kelola tidak bertumpu pada sanksi dan kewenangan dan menunjukkan bahwa perspektif pemerintahan kelembagaan/konstitusional terbatas dan menyesatkan (Ikeanyibe, 2016).

Pada penelitian ini lebih berfokus dengan menerapkan paradigma yang ke enam yaitu *Governance*. Dalam hal ini, penelitian ini membahas tentang kolaborasi antar *stakeholders* dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir agar berjalan dengan efektif dan efisien yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah termasuk BPBD Kota Semarang. Dengan demikian, pemerintah mampu mengatasi permasalahan bencana banjir dengan menetapkan beberapa kebijakan agar meminimalisir tersebarnya genangan air atau banjir di sekitar lingkungan Kota Semarang.

1.5.4 Manajemen Publik

Menurut Stoner dan Wankel (1996: 4) dalam Pasolong (2017) menjelaskan bahwa definisi manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang melibatkan

beberapa pihak seperti anggota suatu lembaga dalam pencapaian tujuan organisasi. Disisi lain, menurut Shafritz dan Russel (1997:20) dalam Pasolong (2017), manajemen merujuk pada tanggung jawab individu yang mengelola organisasi dan memanfaatkan sumber daya, termasuk manusia dan teknologi dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, definisi tersebut tidak menunjukkan dengan suatu proses bertanggung jawab dalam menjalankan suatu proses manajemen. Selain itu, menurut Donovan dan Jackson (1991) dalam Pasolong (2017) mengatakan bahwa manajemen dijadikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh lembaga tertentu dengan *skills* dari anggotanya, serta dijadikan sebagai serangkaian tugas tertentu. Berdasarkan pandangan dari Boyatiz dalam Keban (2014) menyatakan bahwa memiliki empat kelompok kompetensi yang ada di dalam manajemen, yakni sebagai berikut:

1. Kelompok manajemen memiliki tujuan dan langkah-langkah yang meliputi fokus pada efisiensi, tindakan yang proaktif, kesadaran terhadap dampak yang mungkin terjadi, dan penerapan konsep diagnostik.
2. Kelompok pengarah dengan bawahannya adalah menggunakan kekuasaan unilateral, mengembangkan spontanitas dan yang lain.
3. Kelompok MSDM adalah melakukan sosialisasi, pengelolaan kelompok tertentu, memiliki persepsi yang positif, menilai diri dengan akurat, mengendalikan diri, daya tahan tubuh serta kemampuan beradaptasi dengan baik.

4. Kelompok kepemimpinan adalah melakukan pengembangan percaya diri, konseptualisasi, memiliki pemikiran yang logis, serta menggunakan prestasi lisan.

Menurut Wijaya (2014) menyatakan bahwa manajemen publik memiliki tugas dasar yaitu untuk mengembangkan pengetahuan tentang sistem administrasi serta manajemen yang dimanfaatkan pada suatu sektor publik dan organisasi swasta. Administrasi publik adalah salah satu cabang dari jenis keilmuan yang lebih luas dalam terminologi *public management* atau manajemen publik. Ott, Hyde & Shafritz (1990) dalam Wijaya (2014), manajemen publik adalah bagian dari administrasi publik yang secara khusus mempelajari perencanaan program, perbaikan atau pemulihan organisasi, alokasi sumber daya berdasarkan sistem anggaran, manajemen keuangan, MSDM, serta evaluasi dan audit program.

Dengan munculnya manajemen publik yang dijadikan sebagai keilmuan yang berdasarkan pada pemikiran yang sederhana. Dalam hal ini, organisasi publik diatur dan diawasi oleh manajer publik dalam segala tindakannya. Kemudian, manajer akan memiliki peranan penting dalam mengatur segala urusan yang berkaitan dengan organisasi publik. Maka dari itu, manajemen publik merupakan studi yang mempelajari tentang cara manusia melakukan manajemen dalam organisasi sektor publik. Di samping itu, manajemen publik memusatkan perhatiannya pada aspek internal lembaga pemerintah, termasuk cara mengatur organisasi sektor publik secara efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi,

karakteristik yang dimiliki oleh organisasi sektor publik tidak sama dengan yang dipunyai oleh sektor lainnya. Namun, organisasi sektor publik juga cenderung masih memberi perhatian terhadap kenyataan eksternal organisasi sektor publik yang berkaitan dengan kepentingan publik serta kebijakan publik (Wijaya, 2014).

Menurut Laurence Lynn (1996) dalam Wijaya (2014) menyatakan bahwa manajemen publik memiliki 3 gambaran meliputi manajemen publik sebagai seni (*art*), manajemen publik sebagai ilmu (*science*), serta manajemen publik sebagai profesi (*profession*). Pada umumnya, manajemen publik sebagai seni merupakan kegiatan kreatif yang dijalankan oleh aktor-aktor publik yang tidak mampu dipelajari dengan cara ‘dihitung’. Dalam hal ini, yang dimaksud ‘dihitung’ yakni manajemen publik adalah sebuah kegiatan yang mempunyai tingkatan fleksibilitas yang tinggi serta sangat berkaitan dengan situasi dan kondisi suatu operasional. Kemudian, manajemen publik sebagai ilmu adalah suatu analisis yang sistematis melalui interpretasi serta eksplanasi. Selanjutnya, pada manajemen publik sebagai profesi menunjukkan kepada sekelompok orang yang mengabdikan dirinya terhadap ilmu tersebut (Wijaya, 2014).

Paradigma manajemen publik yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *New Public Management (NPM)*. Sementara itu, NPM merupakan upaya yang dilakukan oleh para ahli administrasi negara untuk menangani tantangan yang dihadapi pemerintah diberbagai negara maju dan berkembang, yang muncul sebagai hasil dari berbagai masalah yang timbul

akibat banjir. Berdasarkan penjelasan mengenai pendekatan NPM, upaya reformasi dalam manajemen publik terhadap banjir di Kota Semarang perlu dilakukan salah satunya melalui *collaborative governance* dalam rangka menciptakan kualitas pengelolaan yang optimal. Di sisi lain, NPM dalam *collaborative governance* dapat menciptakan aktivitas penanggulangan bencana banjir secara baik guna menjaga kesejahteraan publik.

1.5.5 Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan koordinasi antara organisasi pemerintah dengan organisasi non pemerintah dalam penyusunan keputusan bersama secara formal, hal ini menekankan pada pencapaian kesepakatan dan diskusi, serta tujuan dari kolaborasi ini untuk merancang ataupun melaksanakan kegiatan publik (Ansell and Gash, 2008). Selain itu, Emerson, dkk. (2011) juga mengemukakan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu sistem dan metode dalam pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan yang melibatkan partisipasi aktif dari individu-individu secara positif dalam kerangka lembaga-lembaga publik, tingkat pemerintah, sektor swasta, sipil, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai kepentingan bersama yang tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja.

Pada dasarnya, konsep *collaborative governance* mengacu pada keterlibatan instansi-instansi yang berkaitan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan agar dapat memecahkan suatu masalah yang dimulai dari kerjasama maupun dari inisiatif masing-masing pemangku

kepentingan (*stakeholders*) untuk menetapkan atau mendeskripsikan tujuan, menilai hasil, melakukan perubahan, dan sebagainya. Inisiatif yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, langkah awal dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kebutuhan yang tepat dalam mewujudkan kepentingan publik yang lebih besar. Kedua, setiap pemangku kepentingan maupun instansi yang berkaitan dalam pelaksanaan kolaborasi perlu memiliki peran untuk menetapkan tujuan-tujuan kolaborasi tersebut. Ketiga, keterkaitan antar instansi yang terlibat dalam kolaborasi perlu bersifat strategis, yang berarti bahwa masing-masing instansi dalam melaksanakan tindakan dapat dilihat dari pemberian respon yang baik dalam transparansi.

Berdasarkan pandangan beberapa pakar, peneliti dapat menyimpulkan bahwa esensi dari konsep *collaborative governance* adalah tanggapan pemerintah terhadap penyelesaian masalah publik, pengelolaan administrasi pemerintahan, dan pelaksanaan program-program pemerintah. Pemerintah diharapkan untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat atau sektor swasta lainnya dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks dalam pelaksanaan program-program tersebut. Secara garis besar, *collaborative governance* perlu diterapkan karena alasan-alasan seperti :

- a. Adanya rasa ketergantungan dan kompleksitas antar instansi.
- b. Timbulnya pertikaian di antara kelompok-kelompok kepentingan yang tidak terbuka sehingga sulit untuk diredam.

- c. Upaya untuk mencari solusi baru dalam pencapaian legitimasi politik.

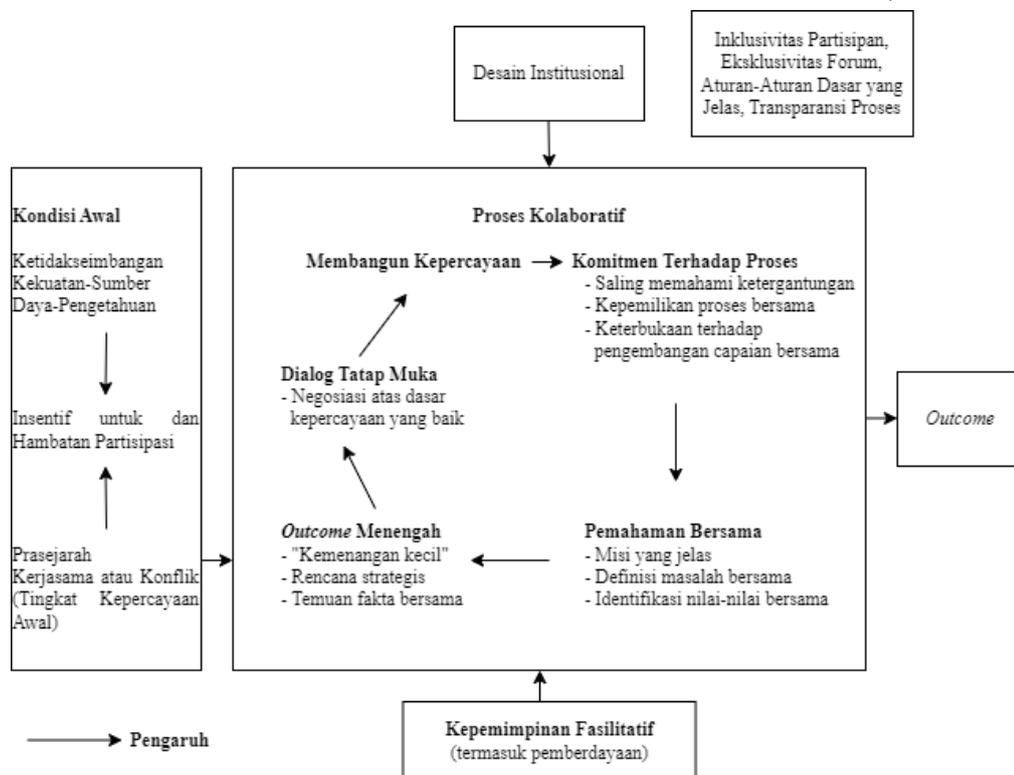
Pendapat lain yang mengemukakan pentingnya pelaksanaan *collaborative governance* (Ansell and Gash, 2008) yakni karena:

- a. Implementasi kebijakan di tataran lapangan yang mengalami kegagalan.
- b. Kelompok-kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk memisahkan penguasaan pemerintahan dan menggunakan berbagai institusi lain sehingga hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan.
- c. Pemberdayaan kelompok-kelompok kepentingan.
- d. Tingginya biaya dan politisasi dalam regulasi.

Ansell & Gash (2008) berpendapat bahwa untuk memperoleh hasil yang terbaik, maka perlu menerapkan enam kriteria dasar pada *collaborative governance*, yakni sebagai berikut 1) Forum perlu dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, 2) Lembaga non pemerintah berpartisipasi dalam kolaborasi, 3) Dalam pengambilan keputusan peserta harus aktif, 4) Forum telah diatur dengan formal, 5) Dibuatnya forum untuk pengambilan keputusan dalam membuat kesepakatan bersama, dan 6) Kebijakan ataupun manajemen publik menjadi fokus kerja sama. Apabila telah menjalankan enam kriteria tersebut, maka *collaborative governance* tersebut akan menciptakan kebijakan yang solutif.

Ansell and Gash (2008) menciptakan gagasan terkait model *Collaborative Governance*. Model *Collaborative Governance* meliputi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Dalam model *Collaborative Governance* yang menjadi kunci utama yakni proses kolaborasi, lalu diikuti oleh kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan yang menjadi kontribusi penting bagi proses kolaborasi. Proses kolaborasi ini dapat dikatakan sebagai kunci utama karena dalam model ini menjelaskan tentang perubahan strategi kolaborasi seiring dengan perubahan konteks. Pelaksanaan kolaborasi juga berkaitan dengan pencapaian siklus yang baik antara komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman, serta hasil. Berikut ini penjelasan mengenai model dari *Collaborative Governance* yang digambarkan dalam gambar 1.2:

Gambar 1. 2 Model Collaborative Governance Ansell & Gash, 2008



Sumber : Ansell & Gash (2008)

a. Kondisi Awal :

Kondisi awal pembentukan kolaborasi ini dipengaruhi oleh sejumlah fenomena yang beragam, termasuk kesamaan kepentingan dan tujuan yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sejarah kerjasama sebelumnya, saling menghargai antar sektor, perbedaan keyakinan di antara para pemangku kepentingan, tidak seimbang nya kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan pada sebuah kolaborasi.

b. Kepemimpinan Fasilitatif

Berikut ini tiga komponen dalam menciptakan kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yakni :

- 1) Memiliki manajemen yang efisien dalam proses kolaborasi;
- 2) Dapat mengelola kemampuan dalam mendapatkan kepercayaan secara teknis;
- 3) Penting untuk meyakinkan kolaborasi yang dijalankan menghasilkan keputusan yang dapat dipercaya dan meyakinkan bagi semua pihak yang terlibat.

c. Desain Kelembagaan

Dalam model ini, terdapat prinsip-prinsip dasar yang kritis dalam pelaksanaan kolaborasi, di mana legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi menjadi suatu hal yang penting. Selanjutnya, dalam menjalankan proses kolaborasi, penting untuk menekankan bahwa pemerintah perlu memiliki sifat yang terbuka dan inklusif.

d. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi terdiri dari 5 indikator yakni *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Berikut ini penjelasan mengenai indikator dari proses kolaborasi:

1) Dialog Tatap Muka (*Face To Face Dialogue*)

Dialog tatap muka menjadi tahap awal pada proses *collaborative governance*. Pada tahap ini, seluruh kolaborasi antar *stakeholders*

dibangun dengan mengacu kesepakatan atau konsensus yang dibuat. Pada dasarnya, dialog antar *stakeholders* dilaksanakan agar mampu mengidentifikasi peluang yang tepat untuk saling menguntungkan antar *stakeholders* yang terlibat.

2) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan menjadi tahap kedua pada proses kolaborasi. Selain itu, membangun kepercayaan berkaitan erat dengan proses dialog tatap muka. Dengan begitu, para pemimpin dalam melaksanakan kolaborasi perlu membangun kepercayaan antar *stakeholders* agar dapat menjalankan kerjasama dengan baik.

3) Komitmen Terhadap Proses (*Commitment To The Process*)

Pada tahap ini, dalam proses kolaborasi memiliki kondisi saling tergantung yang tinggi antar *stakeholders* untuk meningkatkan komitmen dalam berkolaborasi. Maka dari itu, perlunya ditekankan bahwa kolaborasi dapat dikatakan sebagai kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan satu sama lain antar *stakeholders*.

4) Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Dalam proses kolaborasi, penting untuk menciptakan kesepakatan di antara para pemangku kepentingan agar dapat mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan tujuan yang terdefinisi dengan jelas, pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi, dan

pemahaman tentang nilai-nilai yang ingin dicapai melalui kerja sama atau kolaborasi.

5) Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Pelaksanaan proses kolaborasi memiliki hasil keluaran yang dapat dikatakan sebagai hasil dari yang telah dijalankan pada tujuan dan manfaat kolaborasi, serta terdapat kemenangan kecil dari adanya kolaborasi.

Menurut Government of Canada (2008) dalam Astuti, R., dkk. (2020) menyatakan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan kolaborasi yakni, sebagai berikut:

a. Faktor Budaya

Kecenderungan budaya terhadap ketergantungan pada prosedur dan ketidakmampuan mengambil risiko dapat mengakibatkan kegagalan dalam upaya kolaborasi. Disisi lain, pelayan publik dan pemimpinnya perlu mempunyai keterampilan dan kesiapan untuk terlibat dalam kerja sama yang praktis dan berfokus terhadap pencapaian hasil, sehingga hal ini dapat menciptakan kolaborasi yang optimal. Ketergantungan pada prosedur dan ketidakmampuan mengambil risiko dapat menghambat kolaborasi dan menghambat kemajuan dalam meningkatkan kualitas kolaborasi. Kemudian, apabila dalam berkolaborasi pemerintah masih menerapkan konsep *top-down* sehingga hal ini dapat menimbulkan dominasi sektor pemerintah dan tidak menjalankan kesepakatan bersama. Disamping itu,

kegagalan lain dalam kolaborasi adalah menggunakan strategi untuk memecah belah dengan memihak pada pihak-pihak yang mendukung kebijakan pemerintah dan mengabaikan pihak-pihak yang menentang kebijakan pemerintah.

b. Faktor Institusi

Kolaborasi terjadi karena kecenderungan lembaga yang terlibat dalamnya, yang seringkali dijalankan oleh aktor pemerintah yang menerapkan struktur hierarkis. Kolaborasi yang bersifat spontanitas cenderung tidak memerlukan peraturan formal yang ketat dan tidak terikat pada proses tradisional sehari-hari atau SOP yang biasa dijalankan. Selanjutnya, institusi yang masih menjaga struktur hierarkis tidak cocok untuk kolaborasi karena kolaborasi membutuhkan organisasi yang horizontal antara pemerintah dan non pemerintah.. Selain itu, dalam kolaborasi akuntabilitas organisasi-organisasi publik masih kaku serta hanya mengacu pada pertanggungjawaban organisasi kepada pimpinan ataupun aturan-aturan yang berlaku.

1.5.6 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana merupakan suatu upaya kegiatan kebencanaan yang dilakukan baik sebelum terjadi bencana, saat bencana, dan setelah bencana serta untuk mengurangi bencana yang terjadi yaitu kegiatan pencegahan, mitigasi bencana, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Indrajit (2020) dalam Yulianto, S., dkk. (2021)

menjelaskan bahwa penanggulangan bencana adalah suatu bentuk tanggung jawab yang dijalankan oleh pemerintah untuk menjaga dan melindungi warga negara sebagai perwujudan keamanan insani bagi setiap warga negara dalam sebuah negara tersebut. Kemudian, Darmono (2010) dalam Yulianto, S., dkk. (2021) berpendapat bahwa keamanan insani terhadap warga negara merupakan sebagai bagian dari keamanan nasional yang dilindungi oleh negara dengan melakukan tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga warga negaranya dari berbagai macam ancaman risiko bencana, baik secara psikis ataupun fisik.

Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam UU No. 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana diatur bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Kontruksi (2017) dalam Modul Penanggulangan Bencana, tujuan dari pelaksanaan penanggulangan bencana adalah memastikan bahwa pelaksanaannya terintegrasi, direncanakan, dikoordinasikan, dan menyeluruh, dengan tujuan melindungi warga negara dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Shalih, O. & Nugroho, R. berpendapat bahwa didalam kerangka kebijakan penanggulangan bencana berisi tentang urusan seluruh pihak terkait (multi

stakeholders) seperti pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.

Pelaksanaan penanggulangan bencana meliputi tiga tahapan yakni, sebagai berikut:

- a. Pra bencana
 - 1) Kegiatan ini dalam keadaan tidak sedang terjadi bencana.
 - 2) Kegiatan ini dalam keadaan yang memiliki potensi timbulnya bencana.
- b. Tanggap darurat, dilaksanakan pada saat terjadi bencana, seperti :
 - 1) Kegiatan ini dijalankan dengan melakukan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana dan harta benda.
 - 2) Kegiatan ini dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar para korban, melindungi korban, mengurus pengusian penyelamatan, dan memulihkan sarana dan prasarana yang rusak akibat terjadinya bencana.
- c. Pasca bencana, dilaksanakan setelah terjadinya bencana, seperti :
 - 1) Kegiatan rehabilitasi.
 - 2) Kegiatan rekonstruksi.

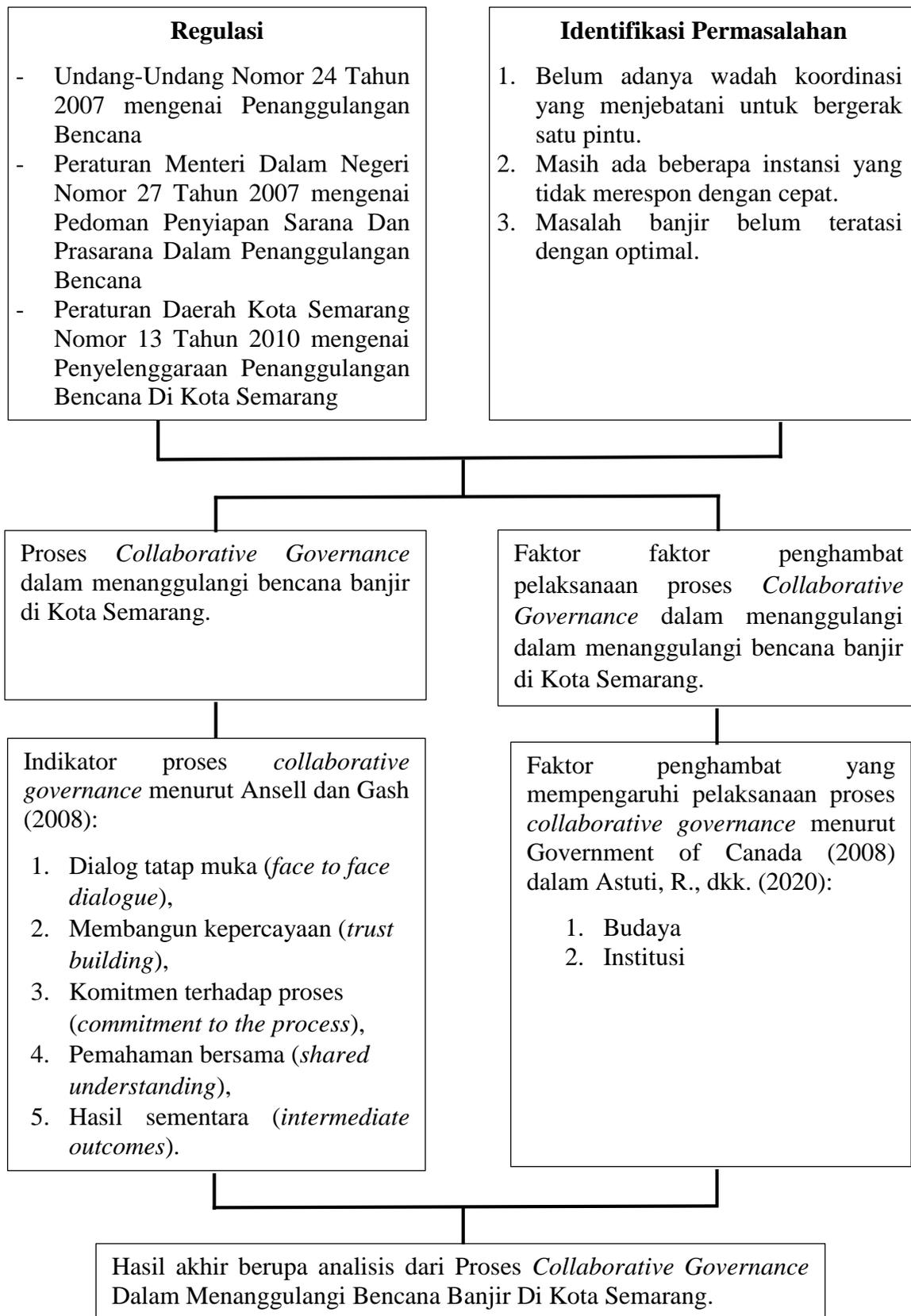
Tahapan-tahapan bencana ini sebaiknya tidak dijadikan sebagai pembagian tahapan yang tegas, karena setiap kegiatan pada tahapan tertentu dapat selesai pada saat tahapan selanjutnya dimulai. Namun, seharusnya pada setiap tahapan ini dilakukan dengan bersamaan sesuai

dengan bagian kegiatan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam fase pemulihan dari penanggulangan bencana, pemulihan menjadi fokus utama, tetapi langkah-langkah pencegahan dan mitigasi bencana juga harus dilaksanakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana di masa mendatang.

Pada dasarnya, mekanisme pelaksanaan penanggulangan bencana ini mengacu pada UU No. 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa mekanisme penanggulangan bencana terdiri dari tiga tahapan, yakni:

- a) BPBD memiliki fungsi yang bersifat koordinasi dan pelaksana pada kegiatan pra bencana.
- b) BPBD memiliki fungsi yang bersifat koordinasi, komando, dan pelaksana pada saat darurat bencana.
- c) BPBD memiliki fungsi yang bersifat koordinasi dan pelaksana pada kegiatan pasca bencana.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.7 Operasionalisasi Konsep

Collaborative governance dalam penanggulangan bencana banjir merupakan suatu kerjasama antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) guna membantu percepatan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang, hal ini dapat dilihat berdasarkan proses *Collaborative governance* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang, meliputi:

- a. *Face to Face Dialogue* : Suatu kegiatan yang mempertemukan *stakeholders* terkait dengan penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Dalam pertemuan ini membahas mengenai perannya masing-masing sesuai arahan dari Walikota untuk membantu mengatasi permasalahan banjir di Kota Semarang. Akan tetapi, pada proses kolaborasi ini belum adanya wadah koordinasi yang menjebatani untuk bergerak satu pintu dan masih ada instansi lain yang sulit dimintakan data.
- b. *Trust Building* : Pelaksanaan kolaborasi juga melakukan membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan cara berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik agar dapat memecahkan masalah penanggulangan banjir di Kota Semarang. Namun, faktanya masih ada beberapa instansi yang tidak merespon dengan cepat, hal ini dapat memperlambat proses pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.
- c. *Commitment to The Process* : Suatu proses kolaborasi antar *stakeholders* untuk saling berkomitmen satu sama lain dalam menindaklanjuti penanggulangan banjir di Kota Semarang. Namun, masih adanya masalah yang

terjadi seperti keterbatasan pendanaan dan kekurangan jumlah personil yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang, karena dalam penanggulangan ini membutuhkan dana yang cukup untuk menyiapkan fasilitas yang memadai dan membutuhkan personil yang banyak dan berkompeten.

- d. *Shared Understanding* : Suatu proses kolaborasi antar aktor dalam menyamakan tujuan dan kesepahaman bersama dalam menangani masalah tersebut. Dalam pelaksanaan kolaborasi penanggulangan banjir di Kota Semarang masih terdapat permasalahan yakni kebijakan SOP yang berbeda dari masing-masing instansi sehingga dapat menyebabkan kebentrokkan antar instansi dalam penanggulangan bencana banjir.
- e. *Intermediate Outcomes* : Hasil sementara atas proses yang berlangsung dalam pelaksanaan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang dapat dilihat dari penerapan *collaborative governance* dalam menangani banjir di Kota Semarang bahwa pelaksanaan kolaborasi antar sektor belum berjalan dengan optimal dan efektif, karena adanya rasa ego sektoral, jadi ketika ada masalah banjir itu masih ada yang merasa bukan tupoksinya sehingga tidak mau melakukan hal yang diluar tupoksinya dalam pelaksanaan penanggulangan banjir.

Faktor penghambat pelaksanaan proses *collaborative governance* dalam menanggulangi banjir di Kota Semarang, meliputi:

- a. Budaya : Kecenderungan budaya terhadap ketergantungan pada prosedur dan ketidakmampuan mengambil risiko maupun terobosan dapat

mengakibatkan kegagalan dalam upaya kolaborasi. Ketergantungan yang berlebihan pada prosedur dapat menghalangi pelaksanaan kolaborasi dan mencegah peningkatan kualitas kolaborasi itu sendiri. Selain itu, faktor kegagalan lainnya dalam berkolaborasi dapat dilihat bahwa pemerintah masih menerapkan konsep *top-down*, hal ini dapat dilihat dari adanya dominasi sektor pemerintah dan tidak menjalankan kesepakatan bersama. Kemudian, gagalnya kolaborasi juga dapat dilihat bahwa partisipasi *stakeholders* seringkali dianggap bukan hal yang utama, tidak penting, dan didominasi oleh kelompok dominan atau sektor pemerintah melalui konsep *top-down*. Dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang masih ada instansi yang kaku terhadap prosedur yang ada sehingga tidak berani mengambil risiko yang tinggi dan berbahaya.

- b. Institusi : Dalam proses kolaborasi, hampir semua institusi yang terlibat dalam kerjasama menggunakan struktur hierarkis terhadap sektor-sektor lain yang terlibat. Namun, sebuah institusi yang masih menggunakan struktur vertikal tidak sesuai dengan kolaborasi, karena kolaborasi memerlukan sistem organisasi secara horizontal antara pemerintah dengan non pemerintah. Disisi lain, dalam kolaborasi ini akuntabilitas organisasi-organisasi publik masih kaku serta hanya mengacu pada pertanggungjawaban organisasi kepada pimpinan ataupun aturan-aturan yang berlaku. Dalam proses kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang ini masih ada oknum yang merasa dirinya senior sehingga dapat merusak citra dari organisasinya tersebut.

1.8 Argumen Penelitian

Setiap wilayah di Indonesia tidak lepas dari permasalahan banjir, salah satunya di Kota Semarang. Namun, pemerintah Kota Semarang sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah dan menanggulangi banjir. Kemudian, penanggulangan bencana banjir ini perlu dilakukan untuk meminimalisir kerusakan maupun mengurangi terjadinya banjir. Hal ini dapat melibatkan instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan banjir. Kemudian, instansi-instansi tersebut perlu melaksanakan kolaborasi untuk mempermudah dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang. Kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah di Kota Semarang belum berjalan dengan optimal karena belum adanya wadah koordinasi yang menjebatani untuk bergerak satu pintu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Namun, seluruh OPD yang terlibat berkomitmen dalam melakukan penanggulangan banjir yang sesuai arahan dari Walikota. Aktor utama penanggulangan bencana banjir adalah BPBD Kota Semarang. BPBD Kota Semarang bertugas untuk memimpin dan mengarahkan kegiatan dalam menanggulangi permasalahan banjir di Kota Semarang.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan pendapat dari Sugiyono (2019), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berdasar pada filsafat postpositivisme agar dapat meneliti mengenai kondisi objek alamiah

dimana peneliti dijadikan sebagai instrumen kunci. Tujuan dari tipe penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian yang berkaitan pada kolaborasi antara para pemangku kepentingan atau aktor-aktor terkait dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.

1.9.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Menurut Nasution (2003) dalam Siagian, dkk. (2022) menjelaskan bahwa lokus penelitian adalah suatu lokasi sosial yang terdiri dari unsur yakni pelaku, tempat, dan kegiatan yang mampu diteliti atau diobservasi. Lokus penelitian juga dapat dikatakan sebagai wilayah dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Penelitian kualitatif dilakukan dalam konteks alamiah, di mana peneliti tidak memanipulasi latar belakang penelitian. Lokus penelitian ini terletak di Kota Semarang. Menurut Spradley dalam buku Sugiyono (2019) memaparkan bahwa fokus penelitian merupakan suatu domain tunggal maupun beberapa domain yang berkaitan dengan situasi sosial. Fokus penelitian juga diartikan sebagai inti dari apa yang diteliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data mengacu pada masalah penelitian yang ditetapkan. Penetapan fokus penelitian sangat perlu dilakukan dalam mencegah pembiasaan terhadap persiapan dan pengkajian permasalahan yang diteliti. Fokus pada penelitian ini adalah proses kolaborasi dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang dan faktor penghambat dari proses kolaborasi dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) memaparkan bahwa subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian agar mampu memperoleh informasi mengenai data penelitian dari informan ataupun narasumber. Subjek penelitian juga diartikan sebagai objek yang dijadikan sebagai fokus peneliti dan memberikan informasi melalui pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Dalam hal ini, target peneliti yang dijadikan informan dalam penelitian ini yakni pemangku kepentingan turut serta secara langsung dalam kejadian bencana tersebut. Selanjutnya, dalam pemilihan informan, penting untuk mempertimbangkan kompetensi dan relevansi mereka dengan permasalahan penelitian, bukan hanya kehadiran mereka saja. Maka dari itu, dalam memilih informan harus diperhatikan dengan baik dan seksama. Karakteristik untuk informan dalam penelitian ini yakni memiliki kesesuaian, kemampuan, wawasan, dan pengetahuan sesuai dengan masalah penelitian agar mampu menyampaikan informasi yang jelas kepada peneliti. Teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini yakni teknik *purposive sampling*. Berdasarkan pernyataan Sugiyono (2019) dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel sumber data yang mempertimbangkan hal-hal tertentu dan secara sengaja. Sementara itu, teknik penentuan sampel yang menggunakan *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel dengan mempertimbangkan karakteristik

yang ditetapkan mengacu pada tujuan penelitian. Dengan demikian, subjek penelitian dalam penelitian ini berasal dari BPBD Kota Semarang, DPU Kota Semarang, Distaru Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, DLH Kota Semarang, BBWS Pemali Juana, Kantor SAR Semarang, PMI Kota Semarang, dan Masyarakat Kota Semarang yang terdampak banjir.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) memaparkan bahwa data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema, serta gambar. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu hal secara objektif mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses kolaborasi dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang dan faktor penghambat dari proses kolaborasi dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan sumber data, sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan tema penelitian tersebut. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan BPBD Kota

Semarang, DPU Kota Semarang, Distaru Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, DLH Kota Semarang, BBWS Pemali Juana, Kantor SAR Semarang, PMI Kota Semarang, dan Masyarakat Kota Semarang yang terdampak banjir.

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data atau informasi kepada peneliti, tetapi melalui media perantara. Penelitian yang menggunakan sumber data sekunder didapatkan dari *website* instansi terkait seperti BPBD Kota Semarang, DPU Kota Semarang, Distaru Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, DLH Kota Semarang, BBWS Pemali Juana, Kantor SAR Semarang, dan PMI Kota Semarang, Rencana Strategis BPBD Kota Semarang, dan undang-undang yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Semarang.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2019) menjelaskan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yakni:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa wawancara adalah suatu pertemuan dua orang yang terdiri dari peneliti dengan informan untuk bertukar informasi melalui tanya jawab. Wawancara juga

diartikan sebagai kegiatan tanya jawab yang dilaksanakan kepada informan atau narasumber yang bersangkutan dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*), hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang argumen, pandangan, dan pola pikir dari informan-informan tersebut. Selain itu, wawancara dijadikan sebagai metode guna mencari fakta-fakta yang belum terungkap dengan kasat mata, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang lengkap dari fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan pemahaman dari peneliti. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam melakukan wawancara yakni dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan penanggulangan banjir seperti BPBD Kota Semarang, DPU Kota Semarang, Distaru Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, DLH Kota Semarang, BBWS Pemali Juana, Kantor SAR Semarang, PMI Kota Semarang, dan Masyarakat Kota Semarang yang terdampak banjir.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa observasi dapat memberikan pembelajaran kepada peneliti tentang perilaku maupun makna dari perilaku yang diperoleh secara langsung di tempat penelitian tersebut untuk mengetahui serta memperkuat kebenaran pada penelitian yang dilaksanakan. Observasi juga dikatakan sebagai suatu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian tersebut untuk mendapatkan berbagai keterangan data yang lebih akurat atau valid

sesuai dengan hal-hal yang diteliti. Observasi langsung terhadap isu-isu terkait penelitian serta observasi metodologis dan dokumentasi dilakukan di lingkungan terdampak banjir di Kota Semarang.

3. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa studi pustaka merupakan kajian teoritis maupun referensi lain terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang terhadap situasi sosial yang diteliti. Teknik studi pustaka pada penelitian ini mengacu pada beberapa buku ataupun referensi untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Langkah selanjutnya, melengkapi atau mencari data-data yang dibutuhkan dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Maka dari itu, dengan membaca bahan-bahan yang berkaitan dengan subjek penelitian, peneliti dapat mengumpulkan data tertulis. Dengan demikian, peneliti menggunakan studi pustaka untuk mencari beberapa data sebagai bahan pendukung pada penelitian tersebut.

4. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni dokumentasi. Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Dokumentasi merujuk pada bukti yang memperkuat sebuah penelitian, yang dapat berupa rekaman atau catatan hasil wawancara dengan pihak terkait yang dilakukan selama proses penelitian.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul sebelum melakukan interpretasi data, perlu adanya pemrosesan analisa data. Kemudian, Santi (2017), analisis dalam penelitian bertujuan untuk mengurangi dan mengatur temuan-temuan sehingga menghasilkan data yang terstruktur, tersusun, dan lebih signifikan. Selain itu, Milles dan Huberman dalam Santi (2017) mengatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga tahapan, sebagai berikut:

1. Proses memilih, menyederhanakan, dan mentransformasikan catatan lapangan secara “kasar” untuk mendapatkan data yang lebih tepat, terorganisir, dan relevan dengan menghilangkan informasi yang tidak relevan dan menyusun data secara cermat disebut reduksi data.
2. Proses penyusunan data atau informasi yang kompleks dan menarik kesimpulan dalam pengambilan keputusan disebut penyajian data.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi berarti merumuskan temuan-temuan luas yang kemudian disempurnakan melalui verifikasi, sehingga memerlukan pemeriksaan pencatatan untuk menjamin keakuratan data yang diperoleh.

1.9.7 Kualitas Data

Menurut Raco (2010) menjelaskan bahwa validitas pada penelitian adalah hasil penelitian yang divalidasi untuk menetapkan dan menentukan keakuratan dan kredibilitas. Uji validitas sangat penting untuk menunjukkan ketergantungan dan validitas data dalam penelitian kualitatif. Memastikan temuan penelitian sejalan dengan perspektif penulis, partisipan, dan

pembaca secara keseluruhan adalah salah satu cara untuk memastikan validitas.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang melibatkan penggunaan informasi atau sumber lain di luar data itu sendiri untuk memeriksa atau membandingkan data dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda, untuk menentukan keaslian data. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana data dievaluasi dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda.